



Kementerian PPN/
Bappenas



Hasil Diskusi FGD Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Wilayah RPJMN 2025 – 2029 Wilayah Kalimantan

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

Jakarta, 2-4 Oktober



I. Gambaran Capaian Makro Daerah



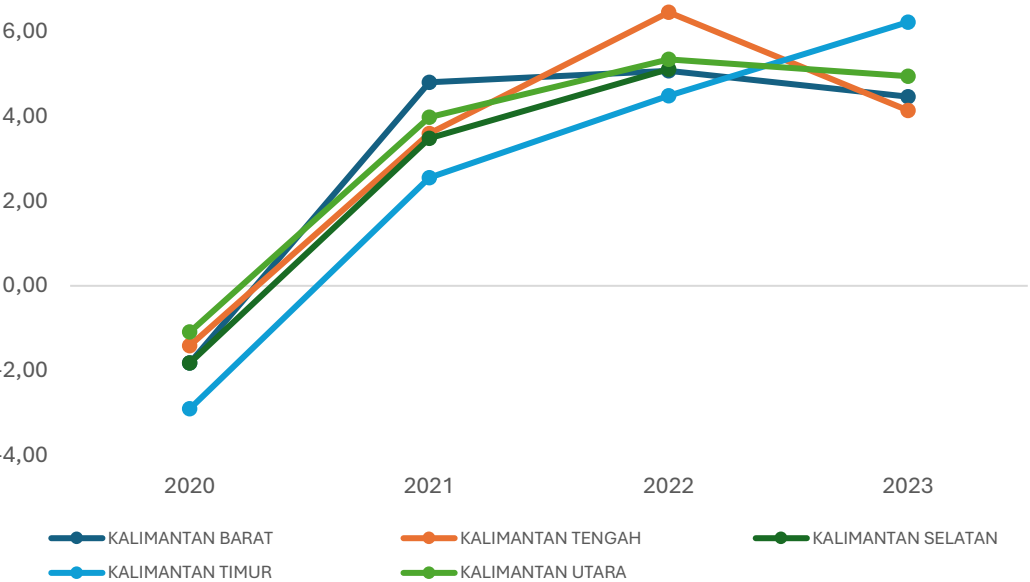
Gambaran Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2023

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			
	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN BARAT	-1,82	4,80	5,07	4,46
KALIMANTAN TENGAH	-1,41	3,59	6,45	4,14
KALIMANTAN SELATAN	-1,82	3,48	5,11	4,84
KALIMANTAN TIMUR	-2,90	2,55	4,48	6,22
KALIMANTAN UTARA	-1,09	3,98	5,34	4,94

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:



Keterangan warna pada heatmap merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama



Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
KALIMANTAN BARAT	Membaik	Stagnan	Melambat	Membaik
KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Melambat	Membaik
KALIMANTAN SELATAN	Membaik	Membaik	Melambat	Membaik
KALIMANTAN TIMUR	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
KALIMANTAN UTARA	Membaik	Stagnan	Melambat	Membaik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik : Tren Kinerja Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan : Tren Kinerja Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat : Tren Kinerja Melambat ($< 0\%$)

- Capaian indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2023 cukup fluktuatif.
- Secara umum, tren kinerja indikator pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Kalimantan sudah cukup baik. Walaupun tren kinerja pertumbuhan ekonominya melambat pada tahun 2022-2023, kecuali Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Pendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian, terutama permintaan ekspor batubara dan migas yang masih kuat, meskipun harga komoditas masih fluktuatif.
2. Meningkatnya aktivitas hilirisasi industri terutama untuk kelapa sawit.
3. Dampak positif pembangunan IKN terutama sektor konstruksi dan bangkitannya.
4. Peningkatan peran sektor pertanian, terutama komoditi perkebunan, yang mencapai produktivitas optimal.
5. Meningkatnya investasi di sektor pertambangan
6. Meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah.
7. Peningkatan sektor industri pengolahan dan perdagangan serta jasa.
8. Kemudahan investasi dan realisasi investasi
9. Peningkatan sektor pariwisata dengan bertambahnya tingkat hunian hotel dan event tahunan mendorong akomodasi makanan dan minuman dan transportasi.
10. Pembangunan PLTA Sungai Sebakung, Mentara.

Faktor Penghambat Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah :

1. Sektor pendorong utama ekonomi tidak berkelanjutan (pertambangan dan penggalian).
2. Belum optimalnya kawasan peruntukkan industri dan KEK Maloy (superhub ekonomi IKN).
3. Nilai ekonomi sektor ekstraktif belum bisa diimbangi oleh sektor nonekstraktif karena produktivitas dan kualitas komoditas pertanian dalam arti luas masih relatif rendah.
4. Masih minimnya produk turunan industri terutama CPO yang masih pada turunan I dan II, serta turunnya harga CPO dunia menyebabkan rendahnya pula produksi sawit.
5. Belum optimalnya aspek pelayanan dan konektivitas wilayah mengakibatkan kurangnya minat investasi.
6. Belum optimalnya peran BUMDES dan Kelompok Usaha Bersama di tingkat tapak sebagai penggerak utama klaster ekonomi lokal berbasis keuntungan komparatif dan kompetitif wilayah.
7. Kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit sehingga pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi.
8. Bencana alam seperti la nina, banjir, dan kebakaran hutan yang menyebabkan gagal panen.
9. Belum beroperasinya terminal barang di PLBN Entikong.

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

Intervensi yang optimal mendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah *) :

1. Pembangunan IKN dan infrastruktur penunjangnya yang optimal
2. Pembangunan PKSN Paloh Aruk
3. PSN Bandara Syamsudin Noor
4. Dukungan pengembangan sektor industri (RDMP, Semen, Smelter, CPO, Minyak Goreng, dll).
5. Pembangunan infrastruktur konektivitas
6. Peningkatan pelayanan perizinan melalui aktif menawarkan IPRO, fasilitasi pelayanan perizinan terutama yang mendorong transformasi ekonomi, forum investasi
7. Penguatan kerjasama daerah perbatasan Malaysia-Indonesia
8. Program ketahanan pangan dan ekonomi
9. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Intervensi yang kurang optimal dalam mendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah *) :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy belum optimal.
2. PKSN daerah perbatasan masih belum optimal.
3. Terminal Barang Internasional Entikong belum beroperasi.
4. Pengembangan sektor pariwisata dan ekraf (termasuk UMKM) belum optimal.
5. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang belum berjalan optimal.
6. Pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura
7. Lambatnya pembangunan jalan dari Pelabuhan Kijing untuk memperlancar distribusi barang.
8. Peremajaan karet masih kurang karena harga karet yang cenderung fluktuatif dan Masyarakat cenderung ke kelapa sawit.

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

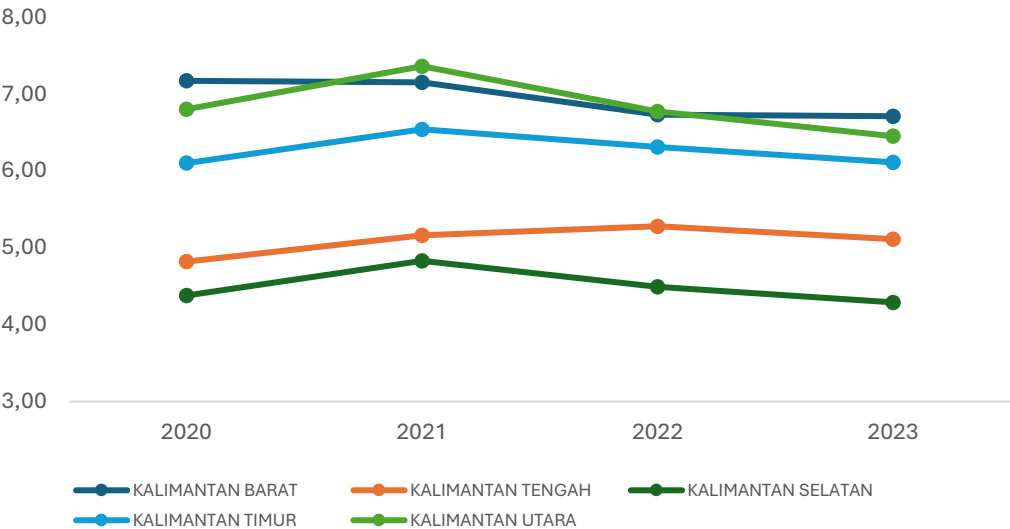
Gambaran Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2023

Provinsi	Tingkat Kemiskinan			
	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN BARAT	7,17	7,15	6,73	6,71
KALIMANTAN TENGAH	4,82	5,16	5,28	5,11
KALIMANTAN SELATAN	4,38	4,83	4,49	4,29
KALIMANTAN TIMUR	6,10	6,54	6,31	6,11
KALIMANTAN UTARA	6,80	7,36	6,77	6,45

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:



Keterangan warna pada **heatmap** merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama



Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
KALIMANTAN BARAT	Stagnan	Membaik	Stagnan	Membaik
KALIMANTAN TENGAH	Melambat	Melambat	Membaik	Melambat
KALIMANTAN SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat ($< 0\%$)

- Capaian indikator tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan tahun 2020-2023 cukup fluktuatif dan bervariasi antarprovinsi.
- Secara umum, tren kinerja indikator tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan cukup stagnan selama 2020 – 2023.

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah:

1. Adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah (jalan, jembatan, air bersih, listrik) membuka peluang ekonomi, memperbaiki akses pasar, dan meningkatkan mobilitas penduduk
2. Stabilisasi harga pangan melalui pengendalian inflasi dan gelar pangan murah untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, membantu daya beli terutama di perdesaan.
3. Pemetaan potensi dan masalah kemiskinan melalui penyusunan data partisipatif desa/kelurahan agar pengentasan kemiskinan tepat strategi sesuai karakteristik
4. Adanya investasi dalam pendidikan dan pelatihan termasuk sektor pertanian dan perkebunan yang diharapkan membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas dan pendapatan.
5. Adanya bantuan usaha, pemberdayaan masyarakat miskin, penyediaan lapangan pekerjaan
6. Penguatan sektor UMKM

Faktor Penghambat Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah:

1. Data sasaran kemiskinan kurang tepat dan tidak terintegrasi. Saat ini terdapat 3 sumber data yaitu DTKS, P3KE, dan Regsosek. Ke depan diharapkan adanya percepatan pemanfaatan data Regsosek.
2. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet
3. Belum terintegrasinya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa
4. Belum efektifnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
5. Terbatasnya Akses terhadap modal dan kredit
6. Ketergantungan pada sektor pertanian yang masih tradisional dimana produktivitas relatif rendah dan sangat dipengaruhi oleh cuaca, harga komoditas, serta akses ke pasar, menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil
7. Belum optimalnya diversifikasi ekonomi dimana bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan

Intervensi yang optimal mendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah *) :

1. Inovasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
2. Inovasi Sistem Informasi Jemput Pasien Miskin *Online* (SIMAS ONLINE)
3. Program pasar dan sembako murah
4. Penguatan program jaminan sosial dan bantuan sosial yang terintegrasi dengan *database* yang akurat
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
6. Program SISKU KUINTIP yang menyasar masyarakat kurang mampu
7. Program petani dan peternak milenial
8. Perluasan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, internet)
9. Pengembangan sektor ekonomi baru termasuk UMKM
10. Pemberdayaan masyarakat miskin dan perempuan terhadap pengembangan ekonomi lokal
11. Peningkatan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi UMKM dan Kerjasama dengan perbankan dan koperasi
12. Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
13. Pembayaran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan
14. Pembangunan rumah tidak layak huni

Intervensi yang kurang optimal dalam mendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah *) :

1. Distribusi Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran
2. Program peningkatan keterampilan yang belum Relevan
3. Penentuan pemanfaatan data baku untuk intervensi penanganan kemiskinan (Kemenko PMK/Kemensos/Regsosek)
4. Infrastruktur dasar yang dibangun belum optimal fungsi dan kebermanfaatannya
5. Pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH dan penanganan kawasan kumuh (kuantitas vs kebutuhan dan kelompok sasaran vs batasan kewenangan)

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

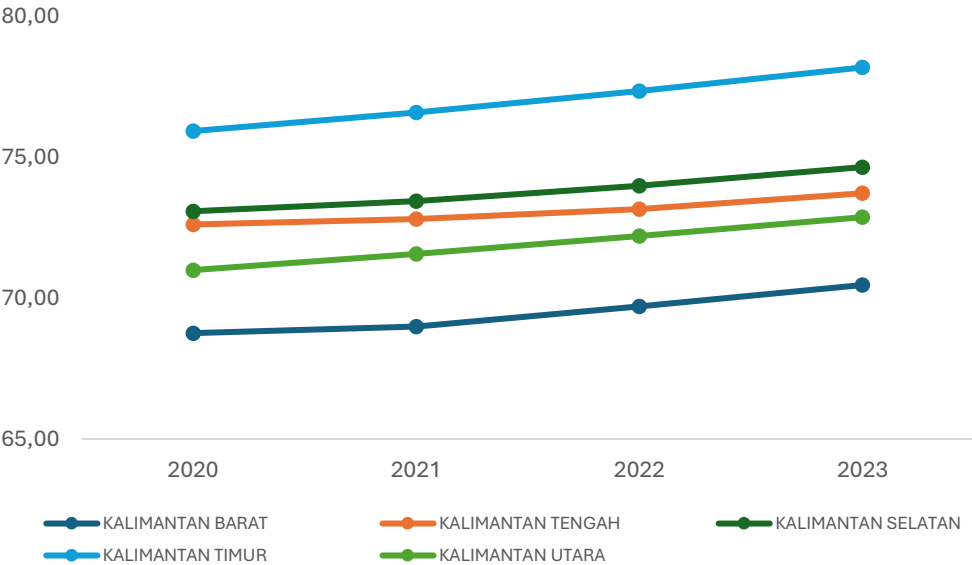
Gambaran Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN BARAT	68,76	68,99	69,71	70,47
KALIMANTAN TENGAH	72,62	72,81	73,17	73,73
KALIMANTAN SELATAN	73,09	73,45	74,00	74,66
KALIMANTAN TIMUR	75,94	76,60	77,36	78,20
KALIMANTAN UTARA	71,00	71,57	72,21	72,88

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:



Keterangan warna pada heatmap merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama



Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
KALIMANTAN BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
KALIMANTAN SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
KALIMANTAN TIMUR	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
KALIMANTAN UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik : Tren Kinerja Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan : Tren Kinerja Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat : Tren Kinerja Melambat ($< 0\%$)

- Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020-2023 cukup membaik.
- Secara umum, tren kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Wilayah Kalimantan membaik hingga tahun 2023.

Faktor Pendukung Capaian IPM Daerah :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas, rumah sakit, dan upaya pencapaian UHC.
2. Penerapan kebijakan dan program wajib belajar 12 tahun secara intensif
3. Peningkatan pemahaman dan akses ke fasilitas pendidikan, ditandai dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
4. Pengembangan jalan, jembatan, dan transportasi umum.
5. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.
6. Pengembangan program pendidikan vokasional dan sertifikasi kompetensi sebagai instrumen strategis peningkatan daya saing SDM

Faktor Penghambat Capaian IPM Daerah :

1. Pernikahan anak dan usia dini masih cukup tinggi
2. Masih banyaknya pekerja anak di daerah pertambangan
3. Tingkat ODF (*Open Defecation Free*) masih tinggi
4. Infrastruktur dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata di semua Wilayah Kalimantan
5. Masih banyaknya sekolah informal, seperti pondok pesantren yang belum mengeluarkan ijazah
6. Masih tingginya penyakit tidak menular, diabetes, darah tinggi karena pola hidup.
7. Belum meratanya ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan dengan standar yang memadai, terutama pada daerah remote/perbatasan
8. Belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan tenaga medis paramedis dengan kemampuan lembaga pendidikan di dalam daerah untuk menyediakan tenaga medis paramedis yang kompeten
9. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan antara daerah perkotaan dan pedesaan

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

Intervensi yang optimal mendukung Capaian IPM Daerah *):

1. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, baik dari dana pusat dan daerah
2. Akses sekolah negeri gratis
3. Peningkatan penyediaan infrastruktur kesehatan
4. Bantuan iuran kesehatan dan JKN bagi masyarakat miskin
5. Program peningkatan gizi untuk menurunkan prevalensi stunting.
6. Program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Intervensi yang kurang optimal dalam mendukung Capaian IPM Daerah *):

1. Fasilitas dan metode pembelajaran di PKBM yang belum adaptif bagi Masyarakat yang sudah bekerja sehingga RLS masih rendah
2. Fasilitas pendidikan tidak merata
3. Fasilitas kesehatan belum memadai
4. Optimalisasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, C

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

II. Rumusan Isu Strategis Kewilayahan



Isu Strategis Kewilayahan: Kalimantan

No	Isu Strategis Wilayah	Justifikasi Isu
1	Degradasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya aktivitas ekonomi ekstraktif di Wilayah Kalimantan seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan karhutla, alih fungsi lahan dan deforestasi
2	Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong tumbuhnya industri nonekstraktif (industri kain dan manufaktur), Produk turunan berbasis SDA
3	Masih terbatasnya kapasitas, kuantitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar	Tidak hanya kualitas tetapi juga masih kurangnya aspek kuantitas infrastruktur di Pulau Kalimantan
4	Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, dan terluar	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Kalimantan memiliki daerah yang masih berada di pedalaman, perbatasan negara dan terluar Masih terdapat desa gelap gulita dan <i>blank spot</i> Masalah perdagangan dan tingginya harga barang di perbatasan
5	Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga penyuluh merupakan corong penyambung terhadap Masyarakat. Penyuluh bisa mengimbangi peran tokoh di tingkat daerah Terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan, serta tenaga penyuluh dan aksesibilitas
6	Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Kalimantan sebagai lumbung pangan <i>Catchment area</i> berkurang Tingginya alihfungsi lahan Mendorong EBT (air dan panas bumi)
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	-
8	Belum optimalnya pengelolaan terkait kebencanaan	Kalimantan rawan bencana karhutla dan banjir.
9	Pemanfaatan Peluang Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara	Adanya Pembangunan IKN dan tema kewilayahan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara

III. Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan



Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan: Kalimantan

No	Isu Strategis Wilayah	Arah Kebijakan Wilayah
1	Degradasi lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong keterlibatan masyarakat dan <i>stakeholders</i> secara partisipatif sesuai kearifan lokal dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mendapat manfaat dari pengelolaan lingkungan 2. Pengkajian kembali terhadap regulasi dan kewenangan (pusat dan daerah) dalam perizinan lingkungan, pengendalian, dan evaluasi contohnya pengendalian perizinan sesuai daya dukung dan daya tampung 3. Peningkatan efektivitas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) 4. Penguatan terwujudnya <i>good mining practice</i> dan tata kelola berkelanjutan 5. Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2	Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembangunan dan pengembangan hilirisasi industri antara lain melalui peningkatan konektivitas antarkawasan industri dan penyediaan air baku 2. Peningkatan diversifikasi produk turunan yang berbasis sumber daya alam dan nonekstraktif 3. Pembangunan dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi 4. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif serta kelembagaan ekonomi rakyat (BUMDes, koperasi, dll) 5. Pengembangan <i>blue</i> dan <i>green economy</i>, serta ekonomi sirkular 6. Kerjasama Regional dan Bilateral dalam mendorong hilirisasi industri 7. Insentif dan kemudahan investasi di kawasan industri
3	Masih terbatasnya kapasitas, kuantitas, dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan konektivitas dengan mengintegrasikan antarmoda antara IKN dengan Provinsi di sekitarnya (laut, darat, udara) agar terhubung jalur logistik antarprovinsi dan antarnegara di Pulau Kalimantan. 2. Percepatan penyelesaian revisi rencana tata ruang Pulau Kalimantan (penyesuaian dengan IKN). 3. Memprioritaskan penyediaan moda transportasi murah dan massal (kereta api). 4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas infrastruktur komunikasi dan ketenagalistrikan. 5. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dasar (air baku, sanitasi, listrik, SPAM). 6. Formulasi regulasi penyediaan infrastruktur menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan Pulau Kalimantan.

Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan: Kalimantan

No	Isu Strategis Wilayah	Arah Kebijakan Wilayah
4	Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, dan terluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran dan regulasi pengelolaan daerah perbatasan negara. 2. Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, pedalaman, dan terluar dengan meningkatkan kerjasama antardaerah. 3. Afirmasi dukungan sumber pembiayaan (DAK, insentif fiskal, dll) dalam pembangunan daerah pedalaman, dan terluar. 4. Percepatan pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan negara di Pulau Kalimantan.
5	Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur terhadap pendidikan dan kesehatan. 2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui balai pelatihan. 3. Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. 4. Pengembangan pola pembelajaran yang adaptif, pendidikan formal, dan informal. 5. Pembukaan sekolah vokasi (menengah, atas, dan akademi) berbasis hilirisasi industri. 6. Penguatan riset dan inovasi hilirisasi komoditas unggulan spesifik daerah.
6	Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong ketersediaan pangan di Pulau Kalimantan. 2. Penegakkan regulasi terhadap alih fungsi lahan dan pengamanan LP2B. 3. Mendorong regenerasi pelaku usaha pertanian (petani, pekebun, peternak, dan nelayan) 4. Peningkatan diversifikasi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih berkelanjutan (PLTA dan PLTN). 5. Mendorong pengembangan modernisasi pertanian. 6. Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan energi dan pangan. 7. Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku

Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan: Kalimantan

No	Isu Strategis Wilayah	Arah Kebijakan Wilayah
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis digital. 2. Penataan daerah melalui pemekaran wilayah. 3. Perlu ada kajian ulang terkait kewenangan (contoh Pendidikan, Kesehatan, kelautan dan perikanan dll.)
8	Belum optimalnya pengelolaan terkait kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan bangunan penampung air dan kanal untuk dimanfaatkan pada saat kemarau/banjir dengan regulasi terhadap konsesi dalam penyediaan embung. 2. Peningkatan upaya mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana dan pemenuhan infrastruktur berketahanan bencana 3. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 4. Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam (tambang, hutan, kelautan dan perikanan) yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 5. Pengendalian dan pengamanan lingkungan hidup melalui penurunan laju deforestasi, pemulihan DAS, rehabilitasi lahan
9	Pemanfaatan Peluang Kalimantan sebagai <i>superhub</i> ekonomi Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas daerah sebagai mitra IKN di seluruh wilayah Kalimantan 2. Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN melalui aktivitas maju dan berdaya saing 3. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional

Terima kasih



dit.peppdbappenas



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id



dit.peppd@bappenas.go.id

